PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. INV. : 0707 /PER-UMP /09
ANGGAL : 07-09-09

ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

OLEH :

NAMA : FITRIN META SANI

NIM : 22 2005 056

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) CABANG PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

NAMA : FITRIN META SANI

NIM : 22 2005 056

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIN META SANI

NIM : 22 2005 056

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang,

Penulis

FITRIN META SANI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PERPUSTAKAAN

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PALEMBANG**
Nama	:	**Fitrin Meta Sani**
NIM	:	**22.2005.056**
Fakultas	:	**Ekonomi**
Jurusan	:	**Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	:	**Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disyahkan
Pada Tanggal.. 11 Agustus 2009 ....

Pembimbing

(Drs. Sunardi, S. E., M. Si)

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan

(Drs. Sunardi, S. E., M. Si)

Motto :

- ☆ *Aku mencintai orang-orang shaleh, meskipun aku belum termasuk golongan mereka. Aku harap, semoga aku mendapat syafaat dari mereka. Aku membenci orang-orang durhaka, meskipun sebenarnya, mungkin, aku termasuk golongan mereka...*

  (Imam Syafi'i)

- ☆ *Jadikan taqwa sebagai perahumu, Sabar sebagai dayungmu, dan Tawakal sebagai peneduhmu....*
- ☆ *Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit...*

  (Penulis)

Kupersembahkan kepada:

- ♥ *Allah SWT Sang pemilik hidup ini.*
- ♥ *Ayah dan Bundaku yang telah memberikan cinta, kasih sayang dengan tulus...*
- ♥ *Saudara-saudaraku tercinta (Yuk Betria & dek Tia)*
- ♥ *Pembimbing Skripsi*
- ♥ *Sahabat-sahabat Terbaikku..*
- ♥ *Almamaterku (UMP, CA.05)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Peran Audit Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Palembang.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan analsis untuk mengetahui apakah audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance.* Akuntan memiliki peran yang penting terhadap peningkatan *good corporate governance.* Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki peran sebagai *compliance auditor* dan *business consultant* bagi perusahaaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan *good corporate governance.* Dalam hal pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi diharapkan BTN mampu menjalankan semua aktivitas perusahaan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujuan yang diemban perusahaan.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku (Hasanul Bahri dan Zanariah) tercinta yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Ayunda dan adikku tersayang (Betria dan Tia) yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Drs. Sunardi, S. E., M. Si, yang

telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si dan Bapak M. Irfan Tarmizi,S.E.Ak.,MBA selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E.,Ak.,M.Si selaku Pembimbing Akademik beserta dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang.
6. Keluargaku tercinta di Baturaja, yang selalu memberikan semangat dan bantuan moril plus materi.
7. Sahabat-sahabat terbaikku (Dwi, Indah, Marda, Shintya, SE., Fera, Aini, Dona, Dani, Mila, Desi, Siska, Dedek, Jenny, Dini, Eka) yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan, waktu yang telah kita lewati bersama akan menjadi kenangan tak terlupakan. *Best friends forever..*

8. Teman-teman seperjuangan di Paket CA 05 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih tuk kebersamaannya yang tak kan terlupakan.
9. Teman-teman KKN Angkatan XXX di Desa Pegayut Pemulutan terima kasih untuk semua kenangan yang telah kalian tinggalkan.
10. Serta pihak-pihak yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, serta do'a yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO iv

HALAMAN PRAKATA v

HALAMAN DAFTAR ISI vi

HALAMAN DAFTAR TABEL xiii

HALAMAN GAMBAR xiiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 7

A. Penelitian Sebelumnya 7

B. Landasan Teori 8

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA PERPUSTAKAAN

1. Teoritis tentang Audit Internal 8

a. Pengertian Audit Internal 8

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 11

c. Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 12

d. Independensi Auditor Internal 13

e. Kompetensi Auditor Internal 15

f. Program Audit 16

g. Pelaksanaan Audit Internal 18

h. Laporan Hasil Audit 20

i. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal oleh Manajemen 21

2. Teoritis tentang *Good Corporate Governance* 22

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) 22

b. Tujuan *Good Corporate Governance* 25

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* 26

d. Manfaat *Good Corporate Governance* 28

e. Pedoman Praktis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* 29

f. Asas *Good Corporate Governance* 32

g. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku 37

3. Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* 39

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian 43

B. Tempat Penelitian 43

C. Operasionalisasi Variabel 44

D. Data yang Diperlukan 44

E. Teknik Pengumpulan Data 45

F. Analisis Data Dan Teknik Analisis 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49

A. Hasil Penelitian 49

1. Sejarah Singkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 49

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 53

a. Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 53

b. Tugas dan Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 60

c. Visi, Misi dan Nilai Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 62

3. Kegiatan dan Produk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 66

4. Data 73

B. Pembahasan 74

1. Pelaksanaan Audit Internal pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 74
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 83
3. Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 90

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 94

A. Simpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel III. 1	Operasionalisasi Variabel	44
Tabel IV. 1	Tabulasi Jawaban Per Indikator	73
Tabel IV. 2	Jawaban Responden tentang Independensi	75
Tabel IV. 3	Jawaban Responden tentang Kompetensi	76
Tabel IV. 4	Jawaban Responden tentang Program Audit	78
Tabel IV. 5	Jawaban Responden tentang Pelaksanaan Audit Internal	79
Tabel IV. 6	Jawaban Responden tentang Laporan yang Dihasilkan	80
Tabel IV. 7	Jawaban Responden tentang Tindak Lanjut	82
Tabel IV. 8	Jawaban Responden tentang Transparansi	83
Tabel IV. 9	Jawaban Responden tentang Kemandirian	85
Tabel IV. 10	Jawaban Responden tentang Akuntabilitas	86
Tabel IV. 11	Jawaban Responden tentang Pertanggung Jawaban	87
Tabel IV. 12	Jawaban Responden tentang Kewajaran	88
Tabel IV. 13	Jawaban Responden mengenai Audit Internal	91
Tabel IV. 14	Jawaban Responden mengenai *Good Corporate Governance*	92

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Terstruktur

Lampiran 2: Surat Keterangan Membaca dan Hapalan Al Qur'an

Lampiran 3: Surat Keterangan Riset

Lampiran 4: Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Lembar Persetujuan Skripsi

Lampiran 6: Biodata Penulis

ABSTRAK

Fitrin Meta Sani/222005056/2009/Analisis Peran Audit Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang/Akuntansi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah audit internal berperan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang. Tujuannya untuk mengetahui apakah audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif , data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang sebagai masukan mengenai peranan audit internal dalam meningkatkan *good corporate governance* dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai sumber informasi mengenai peranan audit internal dalam meningkatkan *good corporate governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang memiliki independensi yang kuat, kompetensi yang memadai, program audit telah berjalan dengan baik serta laporan hasil audit disajikan berdasarkan hasil audit dan temuan-temuan audit, dan pihak manajemen telah melaksanakan tindak lanjut pada akhirnya mengakibatkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi transparansi, kemadirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran berjalan dengan baik atau meningkat. Hal ini berarti pelaksanaan audit internal terhadap peningkatan *good corporate governance* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang yang dilakukan oleh auditor internal dinilai berperan.

Kata Kunci: audit internal, *good corporate governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan audit internal dalam suatu badan usaha seperti bank merupakan tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efesiensi usaha, sehingga bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompetitif, memacu penciptaan laba yang baik. Dalam hal ini tentunya bank diharapkan terjaga kelangsungan hidupnya serta mampu memberi kontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah.

Profesi audit internal mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan keberadaan audit internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen dalam menciptakan sikap profesionalisme dalam setiap aktivitasnya, sehingga mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini.

Ikatan Auditor Internal (*Institute of Internal Auditors*-IIA), yang mengawasi dan menyusun standar bagi audit internal secara internasional, mendefinisikan *audit internal* (Messier dkk,2005:514) sebagai berikut: "Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR PERPUSTAKAAN

pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola".

Good Corporate governance (GCG) merupakan sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem ini antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat organisasi. *Corporate governance* mengatur hubungan antara komisaris, direksi dan manajemen perusahaan supaya terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi.

Latar belakang pentingnya diterapkan prinsip *good corporate governance* adalah terjadinya krisis moneter di Indonesia sejak tahun 1997, telah menyebabkan krisis multidimensi, sehingga banyak perusahaan konglomerasi termasuk perbankan mengalami kebangkrutan. Indonesia mengalami peningkatan inflasi. Harus diakui krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu faktor rendahnya tata kelola, baik di sektor publik maupun swasta. Kelemahan implementasi *good corporate governance* dapat dilihat dari minimnya keterbukaan perusahaan, termasuk keterbukaan dalam hal pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan terutama bagi perusahaan yang belum *go public*, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai pengawas terhadap aktifitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberikan kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.

Peran audit internal adalah untuk menyediakan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Masalah yang kemudian

timbul berkaitan dengan peran audit internal, adalah seberapa efektif keberadaan audit internal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bank umum yang kegiatannya berhubungan dengan pembiayaan perumahan sebagai amanat dari pemerintah, dengan sukses Bank Tabungan Negara dalam bisnis perumahan melalui fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tersebut telah membawa status Bank Tabungan Negara ini menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada tahun 1992 yang bernaung dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga telah meningkatkan status BTN sebagai bank umum menjadi Bank Devisa pada tahun 1994. Layanan bank dalam bentuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C), pembiayaan usaha dalam bentuk dollar, dll bisa diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan status tersebut.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang telah menerapkan *good corporate governance* dalam kegiatan operasional perusahaan sejak tahun 1999, namun disempurnakan pada tahun 2006 dengan di tandatanganinya fakta integritas bagi seluruh BUMN. Secara sederhana, dapat diartikan bahwa seluruh personel dituntut melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) adalah salah satu pelaku ekonomi dengan misi yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia yang semakin besar. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, tekhnologi dan dunia usaha, sehingga

profesionalisme BUMN di segala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan.

Dalam mewujudkan dan meningkatkan *good corporate governance* maka perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan *good corporate governance* itu sendiri. Faktor-faktornya antara lain yakni sumber daya manusia, peralatan yang mendukung, faktor alam dan sumber daya material lainnya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung tersebut pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, dengan diterapkannya prinsip *good corporate governance* diharapkan dalam penyajian laporan keuangan akan lebih transparan, tepat waktu, akurat dan terhindar dari kecurangan.

Akuntan memiliki peran yang penting terhadap peningkatan *good corporate governance*. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki peran sebagai *compliance auditor* dan *business consultant* bagi perusahaaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan *good corporate governance*. Dalam hal pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi diharapkan BTN mampu menjalankan semua aktivitas perusahaan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujuan yang diemban perusahaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat penyimpangan berupa belum dilakukannya tindak lanjut atas temuan audit sesuai dengan yang

dilaporkan pada laporan temuan audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit yang telah dilakukan, serta tingkat independensi dalam audit internal masih dipertanyakan karena audit internal biasanya mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu yang membuat tidak objektif dalam pelaksanaannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* dan menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak menggambarkan dengan jelas kondisi yang terjadi.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) menerapkan *good corporate governance* agar perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu turut serta dalam mensejahterakan masyarakat melalui fungsi-fungsi social seperti pelayanan, pemberdayaan, pengembangan serta bantuan manajemen usaha bagi masyarakat agar lebih berkembang, dan memperoleh keuntungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan *Good Corprate Governance* Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya apakah audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan *good corporate governance*.

b. Bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

Sebagai bahan masukan mengenai peranan audit internal dalam meningkatkan *good corporate governance*.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Tubuh Perusahaan Publik oleh Badriyah (2004). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah peran komisaris independen dalam mewujudkan *good corporate governance* di tubuh perusahaan publik?. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badriyah menyimpulkan bahwa dalam kaitan terciptanya perusahaan dengan penerapan *good corporate governance*, maka dianggap perlu adanya komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan karena independensi komisaris adalah hal yang sangat fundamental sifatnya agar tercapai perusahaan yang *corporate governance*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel *good corporate governance*. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah jika pada penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui peran komisaris independen dalam mewujudkan *good corporate governance* pada tubuh perusahaan publik sedangkan penelitian sekarang ingin mengetahui apakah audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance* pada PT Bank BTN cabang Palembang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad (2007) berjudul Peranan Komite Audit dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT. Kereta Api (Persero) Bandung), perumusan masalah dalam penelitian tersebut bagaimanakah komite audit memberikan perannya terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan?. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan komite audit dalam mewujudkan *good corporate governance* . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey dan data-data diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dan kepustakaan

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit di dalam perusahaan berperan dalam mewujudkan *good corporate governance.* Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada judul, perumusan masalah, serta tujuan penelitian. Sedangkan persamaannya adalah dalam hal ini sama-sama membahas tentang *corporate governance.*

B. Landasan Teori

1. Teoritis Tentang Audit Internal

a. Pengertian Audit Internal

Ikatan Auditor Internal (*Institute of Internal Auditors*-IIA), yang mengawasi dan menyusun standar bagi audit internal secara internasional, mendefinisikan audit internal (Messier dkk,2005:514) sebagai berikut: "Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah

nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Definisi di atas mencerminkan perubahan peran auditor internal. Auditor internal diharapkan memberikan nilai ke organisasi melalui perbaikan efektifitas operasional, selain pertangungan jawab tradisional seperti penelaahan keandalan dan integritas informasi, ketaatan terhadap kebijakan dan perundang-undangan, dan penjagaan aktiva.

Definisi lain dari Tugiman (2003:11) bahwa *internal auditing* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah mambantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Bagian-bagian penting dalam definisi audit internal (Boynton dkk,2003;491),sebagai berikut :

1) Internal menunjukkan bahwa aktivitas auditing dilaksanakan dalam organisasi. Karyawan yang sudah ada dalam organisasi itu dapat melakukan aktivitas audit internal, atau aktivitas tersebut bisa diserahkan kepada profesional lain dari luar organisasi yang melayani entitas tersebut.
2) Independensi dan objektif, menjelaskan bahwa pertimbangan auditor akan bernilai bila bebas dari bias atau penyimpangan.
3) Pendekatan yang sistematis dan berdisiplin, menyiratkan bahwa auditor internla mengikuti standar profesional yang mengatur pekerjaan audit internal.
4) Membantu organisasi mencapai tujuannya, menunjukkan bahwa audit internla dilakukan untuk membantu atau memberi manfaat bagi keseluruhan organsasi tersebut. Beberapa cara spesifik yang dilakukan audit internal untuk menambah nilai mencakup fokus pada perbaikan operasi organisasi serta efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan pengelolaan.

Audit internal adalah bagian dari fungsi pemantauan dalam pengendalian internal yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas pengendalian lainnya.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Tujuan pelaksanaan audit internal (Tugiman,2003:99) adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar.

Ruang lingkup audit internal menurut Tugiman (2003:99-100) adalah menilai keefektivan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektivan sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus;

1) M*ereview* keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2) M*ereview* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal tersebut.
3) M*ereview* berbagai cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4) Menilai keekonomisan dan keefesienan penggunaan berbagai sumber daya.
5) Me*review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit intern menurut Mulyadi (2002:211) merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lainnya, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. Audit intern berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut auditor internal melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1) Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.

2) Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3) Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
4) Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
5) Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian intern entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian intern, ia harus memahami fungsi audit internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit internal tersebut.

d. Independensi Auditor Internal

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan kegiatannya. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi,2002:26-27). Independensi memungkinkan auditor internal dapat melakukan pekerjaan secara bebas dan objektif, juga dapat membuat pertimbangan secara netral dan tidak menyimpang.

Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan obyektivitas (Winters, dkk,2003;413)

1) Status Organisasi

   Status organisasi membantu auditor internal mempertahankan independensinya. Pada beberapa entitas, departemen audit internal secara administratif melapor kepada salah satu departemen dalam entitas, tetapi tetap menjaga independensinya dengan terus berkomunikasi secara langsung dengan dewa direksi.

2) Obyektivitas

   Statement of Responsibilities of Internal Auditor mensyaratkan auditor internal untuk memiliki sikap mental obyektif dan independen ketika melaksanakan audit.

e. Kompetensi Auditor Internal

Kompetensi auditor internal menurut Institut Auditor Intern (Arens,2007:489) bahwa auditor intern:

1) Harus hanya memberikan jasa layanannya yang sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya.
2) Harus melaksanakan jasa layanan audit intern yang sesuai dengan Standar Praktek Profesional dan Audit Intern.
3) Harus terus-menerus meningkatkan kecakapan dan keefektifan serta kualitas jasa layanannya.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16), menyatakan bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.

1) Keahlian

   Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

2) Kecermatan Profesional

   Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang bijaksana dan kompeten dengan mempertimbangkan ruang

lingkup penugasan, kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan, kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance,* biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik analisis lainnya.

3) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL)

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.

f. Program Audit

Menurut Mulyadi (2002:104) program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efesien dan efektif. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Program audit yang baik mencakup (Tunggal,2008;33) sebagai berikut:

1) Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang direncanakan

2) Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan
3) Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilakukan
4) Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada diketahui oleh atasan auditor.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit, antara lain:

1) Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan
2) Memberikan *checklist* pada setiap pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan
3) Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan perusahaan

Keunggulan program audit antara lain sebagai berikut:

1) Meratanya pembagian kerja di antara auditor
2) Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu
3) Program audit memilih tujuan audit yang penting saja
4) Program audit yang digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya
5) Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja

6) Program audit memberi kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan
7) Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas

Kelemahan program audit antara lain:

1) Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja
2) Sering menimbulkan hambatan untuk berpikir kreatif dan membangun
3) Kegiatan audit menjadi monoton.

g. Pelaksanaan Audit Internal

Menurut *Institude of Internal Auditor* (IIA) mengemukakan pelaksanaan audit internal (Tugiman,2003:53-78) adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan yang harus didokumentasikan dan mencakup:
   a) Menerapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan
   b) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa
   c) Menentukan sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan audit
   d) Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu
   e) Melakukan survei langsung
   f) Menulis program audit

g) Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan

h) Mendapatkan persetujuan dan perencanaan pekerjaan audit.

2) Proses

a) Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup dikumpulkan

b) Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sampel harus dipilih

c) Proses pengumpulan analisis dan interprestasi serta dokumentasi harus diawasi untuk memelihara objektivitas.

3) Audit internal harus melaporkan hasil audit

a) Laporan ditulis setelah pekerjaan audit selesai

b) Audit internal harus mendiskusikan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi dengan pihak manajemen

c) Laporan harus objektif dan jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu

d) Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi

e) Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan.

4) Pemeriksaan internal harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan tindakan yang pantas telah dilakukan.

h. Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Auditor internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan memberikan saran perbaikan, apabila disetujui manajemen auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.

Laporan audit internal harus obyektif dan ditulis dengan jelas. Laporan itu tidak hanya menguraikan ruang lingkup audit dan tujuannya, tetapi juga harus disertai dengan hasil audit. Laporan ini harus disampaikan secara tepat waktu dan bersifat konstruktif berikut rekomendasi untuk peningkatan atau perbaikannya. Laporan itu juga harus memuat kinerja yang memuaskan serta langkah perbaikan (Winters dkk,2003;418)

Laporan pemeriksaan (audit) dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria mendasar menurut Courtemanche dialih bahasakan oleh Tugiman (1997:191), yaitu:

1) Objektivitas

   Suatu laporan pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

2) Kewibawaan (*authoritativeness*)

Laporan pemeriksaan harus dapat dipercaya dan mendorong para pembacanya menyetujui substansi yang terdapat di dalam laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima temuan, kesimpulan, dan rekomendasi auditor internal, namun mereka cenderung tidak menolaknya. Mereka percaya kepada auditor internal dan kepada laporan pemeriksaan (audit).

3) Keseimbangan

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistik.

4) Penulisan yang profesional

Laporan pemeriksaan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur berikut:a) struktur, b) kejelasan, c) keringkasan, d) nama laporan, dan e) pengeditan.

i. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Internal oleh Manajemen

Tindak lanjut merupakan tahap akhir dalam audit internal. Tindak lanjut dimaksudkan supaya auditor internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang layak telah diambil sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan temuan audit.

Auditor internal harus menindaklanjuti masalah yang dikemukakan atau rekomendasi yang disampaikan dalam laporan.

Auditor internal harus menentukan apakah setiap tindakan perbaikan yang diperlukan, yang dinyatakan dalam laporan audit, telah dilakukan atau apakah manajemen menyadari risiko yang terkait dengan tidak dilaksanakannya tindakan perbaikan tersebut (Winters dkk,2003;418).

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:18), menyatakan bahwa "penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung resiko karena tidak melakukan tindak lanjut ".

2. Teoritis Tentang *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) (Mardiasmo,2004:17), mendefinisikan *governance* sebagai *"the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels"*. Dari pernyataan tersebut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administration governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Definisi lainnya sebagai berikut:

1) Menurut SK Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Patriadi, 2004).
2) Menurut *Malaysian Finance Committe on Corporate Governance,* Februari 1999, *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain (Patriadi, 2004).
3) Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesian* (FCGI) (Tjager dkk,2003:26), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan

dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

4) *Cadbury Committee* memandang *corporate governance* sebagai (Tjager dkk,2003;27): *A set rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.*

   (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internla maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.)

5) Wahyudin Prakarsa dari Universitas Indonesia:

   "*Corporate governance* merupakan mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai *framework* yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan." (Tjager dkk,2003;28)

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama arti sempit hubungar antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

b. Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama (Sutojo,2008;5). Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut

1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham,
3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, peningkatan nilai perusahaan antara lain ditandai oleh peningkatan nilai modal sendiri mereka. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki para pemegang saham, yang terdiri dari modal yang disetor dan laba yang ditahan.

Semakin besar jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun semakin tinggi pula nilai perusahaan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan kreditur untuk menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dapat juga meningkatkan citra perusahaan dan para pemegang saham di mata pelanggan, masyarakat, para penguasa, karyawan dan perusahaan-perusahaan saingan.

4) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dalam perusahaan dengan *good corporate governance*, chairman dan para anggota *Board of Directors* secara kolektif maupun individual mempunyai pengetahuan yang dalam tentang bidang usaha perusahaannya. Dengan demikian, mereka dapat membimbing anggota manajemen perusahaan secara lebih efektif.
5) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pentingnya penerapan *good corporate governance* maka *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) telah mengembangkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan

tradisi masing-masing negara. Bagi pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud (Tjager,dkk,2003:50-53), adalah sebagai berikut

1) *Fairness* (Kewajaran)

   Yaitu perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

2) *Disclosure* dan *Transparancy* (Transparansi)

   Yaitu pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

3) *Accountability* (Akuntabilitas)

   Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

4) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan yang merupakan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

5) Independensi atau kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *corporate* yang sehat.

d. Manfaat *Good Corporate Governance*

Terdapat empat manfaat diterapkannya *good corporate governance* bagi BUMN (Tjager dkk,2003; 96) adalah:

1) Untuk meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perseroan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.

2) Untuk meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur.
3) Untuk meningkatkan nilai saham perusahaan
4) Untuk mengangkat citra perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan publik, bank maupun BUMN tersebut, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat selain itu, penerapan *good corporate governance* juga dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas.

c. Pedoman Praktis Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan kontinu. Untuk itu menurut Wahyudin (2008;125-126) pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam melaksanakan GCG sebagai berikut:

1) Pelaksanaan *good corporate governance* dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu:
   a) Penetapan visi, misi dan *corporate values*,
   b) Penyusunan *corporate governance structure*,
   c) Pembentukan *corporate culture*,
   d) Penetapan saran *public disclosures*,

e) Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.

2) Penetapan visi, misi dan *corporate value* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.

3) *Corporate governance structure* dapat ditetapkan secara bertahap dan terdirir dari sekurang-kurangnya:

a) Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG yaitu *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*,

b) *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku yang wajar dan dapat dipercaya dai pimpinan dan karyawan bank,

c) Tata tertib Dewan Komisaris dan tata tertib kerja direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing,

d) Organisasi yang ada di dalamnya tercermin adanya *risk management, internal control* dan *compliance*,

e) Kebijkan *risk management*, audit dan *compliance*,

f) *Human resources policy* yang jelas dan transparan,

g) *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.

4) Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guiding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. *Corporate culture* perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.

5) Pembentukan pola dan saran *disclosure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholders*. Sarana *disclosure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), review pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.

Agar supaya perbankan dapat melaksanakan GCG secara efektif diperlukan lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait dengan perbankan perlu memberikan dukungan (Wahyudin,2008;126), misalnya:

1) Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif.

2) Dilaksanakannya penegakan hukum (*law enforcement*).

3) Penerapan standar akuntansi dan standard audit yang mengacu pada standar internasional oleh auditor eksternal.

4) Peningkatan peran dan asosiasi-asosiasi perbankan di Indonesia dalam menunjang dan mensosialisasikan prinsip GCG.

f. Asas *Good Corporate Governance*

Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (Wahyudin,2008;38-39).

1) Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip Dasar,

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratka oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip Pokok Pelaksanaan,

a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya,

b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, system manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan,

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi,

d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Wahyudin,2008;39).

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar,

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan,

a) Perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi peruhaan,
b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG,
c) Perusahaan harus memastikan adanya system pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan,
d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang kosisten dengan nilai-nilai

perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki system penghargaan dan sanksi.

e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (Wahyudin,2008;40).

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip Dasar,

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen.*

Pedoman Pokok Pelaksanaan,

a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*);

b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Wahyudi,2008;40).

4) Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar,

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan,

a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Dasar,

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran.

Pedoman Pokok Pelaksanaan,

a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing;

b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan;

c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik (Wahyudin,2008;41).

g. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku

1) Prinsip Dasar

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah:

a) Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya,

b) Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan.

c) Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan (Wahyudin,2008;41-42).

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan perilaku perusahaan meliputi (Wahyudin,2008;42-43):

a) Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

b) Etika Bisnis

Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c) Pedoman Perilaku

Fungsi pedoman perilaku, meliputi:

(1) Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha shingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan,

(2) Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

3. Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance*

Dalam meningkatkan *good corporate governance* sangat dibutuhkan peranan akuntan perusahaan, baik peran akuntan manajemen maupun peran auditor internal. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:22), fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi.
b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi efektif dan akuntabilitas.
c. Secara efektif mengkomunikasikan resiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Menurut Effendi (2006) fungsi audit internal adalah memberikan penilaian atas pengendalian internal dan proses pengelolaan risiko. Fungsi internal audit (satuan pemeriksaan intern) yang efektif dan memadai mampu menawarkan sumbangan penting dalam mengingkatkan proses *corporate governance*. Hal ini dapat dilakukan oleh internal audit agar dapat berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan ditunjukkan dengan adanya peran auditor internal sebagai evaluasi sistem dan menjamin dapat dipercayainya sistem tersebut (*assurance services*), dan membantu mendesain sistem tersebut dengan memberikan rekomendasi (*consulting services*).

Adanya peran tersebut, maka keberadaan internal auditor dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. *Value added auditing* adalah suatu audit dalam rangka meningkatkan profitabilitas serta kepuasan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan *good corporate*

governance karena merupakan salah satu tujuan dari penerapan *good corporate governance* itu sendiri.

Adapun fungsi audit internal dalam mengevaluasi penilaian atas pengendalian internal diciptakan agar aktivitas operasional perusahaan dapat terkendali dan dilakukan juga oleh semua elemen-elemen yang ada dalam perusahaan. Pengendalian intern harus dapat dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif karena menyangkut harta-harta perusahaan, karena apabila pengendalian intern telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan maka perusahaan dapat lebih meningkatkan *good corporate governance* di dalam perusahaan.

Audit internal juga bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi disamping meneliti seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan, audit internal sebagai salah satu profesi yang menunjang komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan yang sehat (*good corporate governance*). Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi mengingat dari pengertian audit internal dan prinsip-prinsip *good corporate governance* itu sendiri .

Keterkaitan audit internal dengan *good corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan bahwa fungsi audit internal dituntut berperan dalam:

a. Membantu manajemen dalam menilai risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan memberi nasihat kepada manajemen.

b. Mengevaluasi struktur pengendalian internal dan bertanggung jawab kepada komite audit.

c. Menelaah peraturan *corporate governance* minimal setahun sekali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004;11), jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya terdiri dari:

1. Penelitian Diskriptif

   Yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

   Yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

   Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk mengetahui apakah audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance*.

B. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Bank BTN Cabang Palembang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 125 Km 4,5 Palembang 30128.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Audit Internal	Suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.	- Independensi - Kompetensi - Program audit internal - Pelaksanaan audit internal - Laporan yang dihasilkan - Tindak lanjut
Good Corporate Governance	Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengmndalikan perusahaan.	- Transparansi - Kemandirian - Akuntabilitas - Pertanggungjawaban - Kewajaran

Sumber: *Penulis*, 2008

D. Data yang Diperlukan

Menurut Indriantoro dan Bambang (2002:146-147) klasifikasi data dilihat dari cara memperolehnya terbagi menjadi dua:

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan BTN. Data sekunder yang digunakan meliputi gambaran umum BTN, sejarah singkat BTN, struktur organisasi, tugas dan wewenang karyawan BTN , diskripsi dan buku-buku serta literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2003:21-31) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Kuisioner (Angket)

   Kuisioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.

2. Wawancara

   Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3. Pengamatan (Observasi)

   Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4. Tes (*Test*)

   Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara terstruktur yaitu membuat daftar pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh peneliti kepada individu yang terlibat dalam perusahaan yaitu satuan pengawasan intern sebanyak 2 (dua) orang, dan dokumentasi adalah dengan cara meminta data perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data Dan Teknik Analisis

Menurut Kuncoro (2003:124) metode analisis data terdiri dari:

1. Analisis Kualitatif

   Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

2. Analisis Kuantitatif

   Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Penulis akan menjelaskan dari teori-teori yang ada dalam buku-buku referensi yang berhubungan dengan peranan audit internal dalam meningkatkan *good corporate governance.* Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung hasil wawancara terstrktur dengan menggunakan tabulasi yang berupa penilaian dari hasil wawancara terstruktur.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menyajikan tabel dan uraian penjelasan mengenai analisis peranan audit internal dalam meningkatkan *good corporate governance*. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai dengan jawaban, yaitu Ya (S), Ragu-ragu (RG) dan Tidak (TS).
2. Menjumlahkan berapa banyak jawaban Ya (S).

3. Dari semua jawaban Ya (S) dibagi dengan semua jawaban wawancara terstruktur, kemudian dikali 100%.

$$\% \text{ Jawaban} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{\text{Jumlah jawaban responden}} \times 100\%$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dari para responden maka analisis yang dilakukan untuk menentukan audit internal berperan atau tidak dapat dilihat dari kriteria penilaian digunakan klasifikasi D.J Champion (1991;302) sebagai berikut:

1. 0% – 25%, berarti audit internal memiliki peran yang lemah dalam meningkatkan *good corporate governance.*
2. 26% – 50%, artinya audit internal memiliki sedikit peran dalam upaya peningkatan *good corporate governance.*
3. 51% – 75%, berarti audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance.*
4. 76 – 100%, berarti audit internal sangat berperan dalam meningkatkan *good corporate governance.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat PT Bank Tabungan Negara (Persero)

PT Bank Tabungan Negara sepanjang perjalanannya mengukir sejarah dengan segala prestasi yang dimilikinya telah membuktikan perannya dalam menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia untuk menabung, dengan maksud demikian Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No.27 Tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan POSTSPAARBANK dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1898, yang kemudian terus berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki empat cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian keadaan keuangan POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.

Pada tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dengan dan sebagai gantinya pemerintah Jepang mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang tidak berjalan sukses karena

dilakukan dengan paksaan dan hanya berhasil membuka cabangnya di Yogyakarta.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka Tyokin Kyoku sebagai peninggalan Jepang masa itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya dirubah menjadi KANTOR TABUNGAN POS atau disingkat KTP Pembentukan KTP pada saat itu diprakarsai oleh Bapak Darmosoetanto selaku Direktur pertama KTP. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan Kantor Tabungan Pos mendapatkan ujian pada tahun 1946 dengan adanya Agresi Militer Belanda ke Indonesia mengakibatkan didudukinya semua kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos.

Pada bulan Juni 1949 aktivitas Kantor Tabungan Pos dilanjutkan di Yogyakarta, dengan nama "Bank Tabungan Pos RI" berlangsung sampai akhir tahun 1949 akibat dari penyerangan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada RI pada tanggal 27 Desember 1949. lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Perhubungan. Sejarah Bank Tabungan Negara adalah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 09 Tahun 1950 Lembaga Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950 yang mengubah nama "POSTSPAARBANK IN INDONESIA" berdasarkan Staatsblat No. 295 Tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.

Nama Bank Tabungan Pos menurut Undang-undang darurat tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 86 Tahun 1953.Sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 4 Tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 nama Bank Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan Negara.

Pada tahun 1965 dengan alasan "Program Ekonomi", Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan penetapan presiden No. 11 tahun 1965 Lembaran Negara Rebublik Indonesia No. 57 yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 1965, kemudian dengan penetapan presiden No. 17 tahun 1965 Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara beralih menjadi bank tunggal milik negara yang selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep-65/UBS/1965 tanggal 30 Juli 1965, Bank Tabungan Negara ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia unit V.

Dalam Orde Baru Bank Negara Indonesia unit V kembali menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1968. Tugas dan usaha Bank Tabungan Negara berdasarkan undang-undang tersebut diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan.

Pada tanggal 29 Januari 1974 pemerintah dengan keputusan Menteri Keuangan No. B-49/MK/I/1974 Memberikan tambahan tugas

kepada Bank Tabungan Negara yaitu untuk pertama kalinya memberikan pelayanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi Bank Tabungan Negara. Pada tanggal 29 April 1989 Bank Tabungan Negara oleh pemerintah ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum dengan diizinkannya Bank Tabungan Negara melaksanakan kegiatan penerimaan simpanan dalam bentuk giro dan keikutsertaan dalam kliring.

Berdasarkan Undang-undang No. 07 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah tahun1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjsdi Perusahaan Perseroan (Persero), bentuk badan hukum Bank Tabungan Negara telah mendapat penyesuaian.

Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1968 dibubarkan, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara dilanjutkan secara langsung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan *call me* Bank BTN. Penyesuaian bentuk hukum tersebut tidak didahului dengan atau dilakukan dengan cara pembubaran (likuidasi), satu dan lain sebagaimana termasud di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-940/MK.01/1992 tanggal 31 Juli 1992.

Berdasarkan kajian konsultasi independen , Prince Water Coopers, pemerintah melalui Menteri BUMN dalam Surat No. S-544/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

Struktur organisasi Bank Tabungan Negara cabang Palembang diawali dari *Branch Manager* (kepala cabang) sebagai pimpinan puncak cabang yang berfungsi mengkoordinir, mengevaluasi, memenuhi target cabang telah ditentukan, membina dan memberikan pengarahan kepada seluruh bidang yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh sekretaris, Pimpinan Bidang *Retail Service*, Pimpinan Operasional, Pimpinan Bidang *accounting* dan *Control*, Pimpinan Bidang *Loan Service*, *Loan Recovery* serta Pimpinan Kantor Kas yang bertugas memimpin dan mengkoordinir pada bagian masing-masing. Adapun tugas masing-masing seluruh bidang sebagai berikut:

1) Kepala Cabang

Kepala cabang dilaksanakan oleh seorang pimpinan yang berfungsi sebagai penyelenggaraan usaha bank di wilayah kantor cabang, dalam batas wewenang yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Mengelola keuangan, harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan kantor cabang berdasarkan prinsip-prinsip ketatalaksanaan yang sehat dan tertib sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kerja, untuk menunjang operasional kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Sekretaris

Bidang sekretaris ini dilaksanakan oleh seorang sekretaris yang berfungsi mengatur aktivitas manajemen, administrasi kesekretariatan dan membantu berkomunikasi dengan pihak ekstern cabang bagi kepentingan manajemen cabang (*Branch Manager*).

3) Pengawas Internal Control

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Meneliti secara sampling apakah penyaluran kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengeliminasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

b) Meneliti secara sampling apakah penelitian agunan telah dilakukan oleh pejabat lini kredit telah selesai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Pemeriksaan kewajaran menilai agunan.

d) Upaya mengurangi risiko bank

e) Pengikatan agunan.

f) Meneliti apakah semua temuan audit sudah ditindak lanjuti dengan baik oleh pejabat lini guna mengurangi risiko kerugian bank.

4) Wakil Kepala Cabang

Wakil kepala cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: mengarahkan, membina dan mengawasi tugas-

tugas yang dilaksankan bagian masing-masing bidang agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan benar dan tepat waktu. Mengawasi dan mengatur dalam hal pencatatan administrasi, pelaporan, penyimpangan atau pemeliharaan arsip berupa dokumen, surat resmi, data dan informasi. Membina para pegawai di lingkungannya agar dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi.

5) Pejabat Pembantu Pimpinan

Pejabat pembantu pimpinan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: mengesahkan atas kebenaran mutasi dari penerimaan uang tunai dari kantor kas, termasuk pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen keuangan untuk selanjutnya diteruskan kepada kepala seksi pelayanan nasabah. Bertanggung jawab atas penanggulangan tunggakan kredit. Bertanggung jawab atas Rencana Anggaran Pengeluaran (RAP). Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas penghimpunan dana bank.

a) Bidang *Retail Service*

Bidang ini dipimpin oleh *Assistant Branch Manager* (ABM) *Retail Service* (Pimpinan Bidang *Retail Service*) yang berfungsi membina, memberikan pengarahan dan mengkoorddinir aktivitas bidang retail, yang terdiri dari: i) Unit *Teller Service*, dipimpin oleh Pimpinan Unit *Teller Service* (*Teller Service Head*) berfungsi membina dan memberikan pengarahan kepada semua petugas *Teller Service* (*Teller*

Service Officer) dan petugas Kas Besar (*Cash Room Officer*). ii) Unit *Loan Service*, dipimpin oleh Pimpinan Unit *Loan Service* berfungsi membina dan memberikan pengarahan kepada semua Petugas *Loan Service* (*Loan Service Officer*) dan Petugas Pewawancara Kredit (*Loan Interviewer*). iii) Unit *Customer Service*, tidak ada pimpinan yang ada hanya petugas *Customer Service* (*Customer Service Officer*).

b) **Bidang *Operations***

Bidang operations dipimpin oleh seorang *Deputy Branch Manager* (DBM) Operations yang berfungsi membina dan memberikan pengarahan kepada: Pimpinan Unit *Transaction Processing*, Pimpinan Unit *Loan Administration* dan Pimpinan Unit *General Branch Administration*, dengan fungsi masing-masing sebagai berikut:

(1) Pimpinan Unit *Transaction Processing* (*Transaction Processing Head*) berfungsi membina dan memberikan pengarahan kepada: petugas kliring (*Clearing Officer*), petugas data entry KPR (*Data Entry Operator*), petugas administrasi dana (*Fund Administration*), petugas NPK (NPK *Officer*), Petugas Pemeliharaan Hardware Dan Software (*Hardware/Software Officer Maintanance Officer*), Petugas *Processing* (*Processing Officer*) dan petugas pajak (*Tax Officer*).

(2) Pimpinan Unit *Loan Administration* (*Loan Administration Head*) berfungsi membina dan memberikan pengarahan kepada: Petugas Administrasi Kredit (*Loan Administration Officer*), Petugas Dokumen Kredit (*Loan Documentation Officer*), Petugas Administrasi Kredit Korporasi (*Corporate Loan Administration Officer*).

(3) Pimpinan Unit *General Branch Administration* (*General Branch Administration Head*) berfungsi membina dan memberikan pengarahan kepada: Petugas Personalia (*Personalia Officer*), Petugas Logistik (*Logistic Officer*), Sekretariat (*Mailing Officer*), Supir (*Driver*), Pesuruh (*Office Boys*), Satpam (*Security Guard*), *Phone/fax Operator* dan Petugas Kartu Pengawas Anggaran (KPA *Officer*).

c) Bidang *Accounting* dan *Control*

Bidang *accounting control* ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi *Accounting* dan *Control* (*Accounting Dan Control Head*) yang bertugas membina dan memberikan pengarahan kepada semua petugas di unit sebagai berikut:

(1) Unit *Bookeping* dan *Control* terdiri: Petugas Buku Besar (*Legder Officer*), Pengawas Intern Cabang (*Internal Control*), Petugas Arsip (*Filling Officer*), Petugas

Rekonsiliasi SL dan GI (*Reconcilliator*) dan Petugas Nota Jurnal (*Journal Notes Officer*).

(2) Unit *Financial Reporting* dan *Analysis* yang hanya terdiri dari Petugas Pelapor (*Reporting Officer*).

d) Loan Recovery

Bidang *Loan Recovery* dipimpin oleh seorang ABM *Loan Recovery* yang berfungsi untuk membina dan memberikan pengarahan kepada *Loan Account Supervisor* (LAS), *Loan Account Officer* (LAO) dan Petugas Hukum (*Legal Officer*).

e) Kantor Kas

Kantor kas dalam melaksanakan aktivitas sebagai kantor kas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Kas yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas bank di kantor kas.

Pada struktur organisasi Bank BTN Cabang Palembang ini didasarkan pada fungsi inti dimana ada pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi berhubungan langsung dengan nasabah yaitu *Front Officer (Retail Service)* dengan fungsi pendukung atau disebut dengan *Back Officer* (*Operation, Accounting, Control* dan *Loan Recovery*) dan Manajemen Cabang (*Branch Management*).

Struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang dapat dilihat pada gambar IV. 1.

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

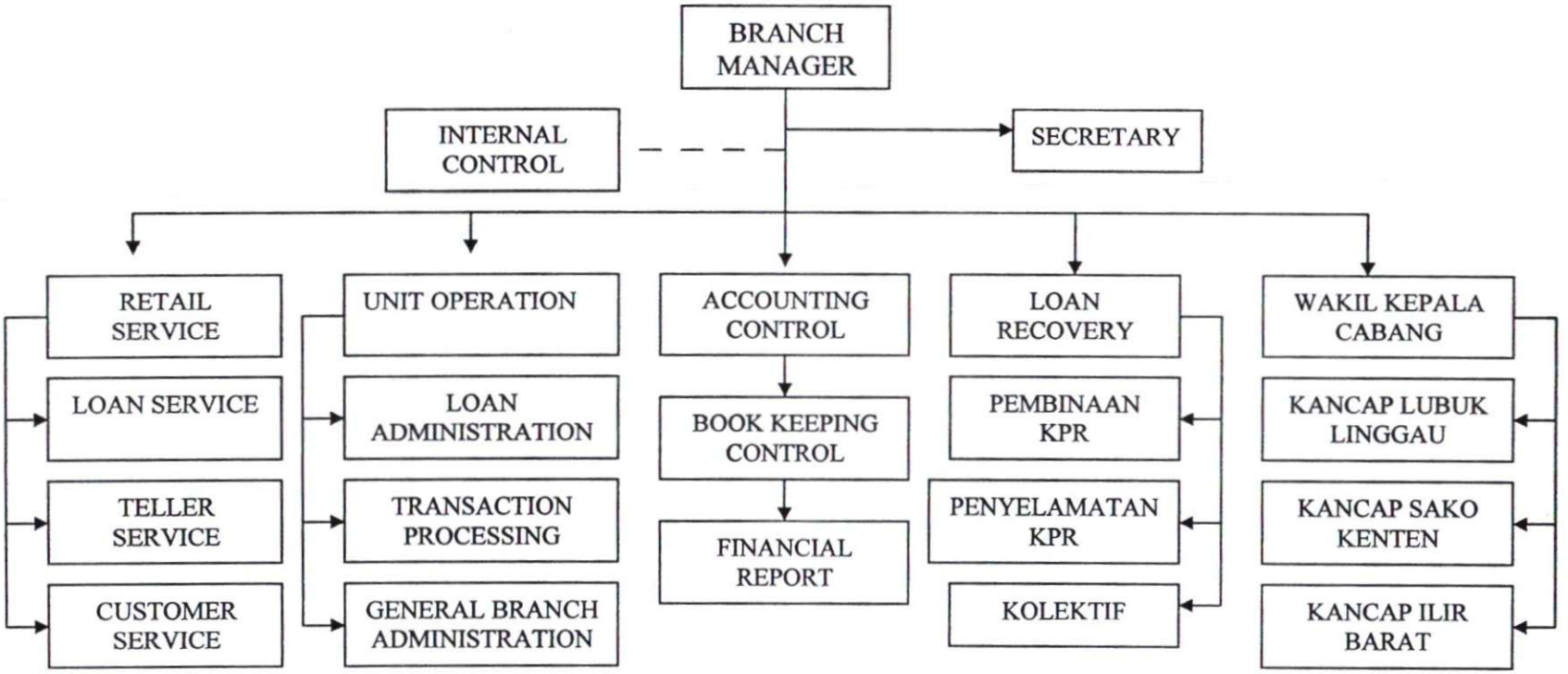

Sumber: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang,2009.

b. Tugas dan Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

Sebagai Bank Umum, Bank BTN mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatannya dalam bidang perumahan. Dalam menyelenggarakan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Bank BTN Pasal 3, bertujuan antara lain:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa simpanan giro, deposito berjangka dan tabungan.
2) Memberikan kredit.
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
4) Membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dari atas perintah nasabah, antara lain: Surat-surat Wesel, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Obligasi.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank BTN melakukan pemupukan dana masyarakat melalui berbagai macam bentuk tabungan (Tabanas Batara dan Tabungan Batara), deposito berjangka, giro dan menerbitkan obligasi serta memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Kegiatan pemberian kredit rumah ini merupakan ciri utama dan merupakan unggula Bank BTN. Adapun bentuk-bentuk kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terdiri dari Griya Pemula (KPRSS), Kapling Siap Bangun, Griya Inti, Griya Madya dan Griya Tama.
2) Kredit Pemilikan Rumah Usaha (KP-RUHA) yang terdiri dari Ruko Sederhana, Ruko Elok dan Ruko Super.
3) Kredit Rumah Produktif (Kredit Griya Multi)
4) Kredit Membangun Rumah (Kredit Sewa Griya)
5) Kredit Sewa Rumah (Kredit Griya Sembada)
6) Kredit Konstruksi (Kredit Jasa Griya)
7) Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)
8) Kredit Swadana
9) Kredit Usaha Kecil (KUK)

Di samping kegiatan usaha yang telah diungkapkan di atas, Bank BTN juga mengadakan beberapa kerjasama dengan beberapa badan dari bidang usaha lain, seperti:

1) Kerjasama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengolahan Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
2) Kerjasama dengan PT. Posindo menyediakan loket-loket tabungan (Tabanas Batara dan Penerimaan Angsuran KPR).
3) Kerjasama dengan beberapa Bank lain seperti PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero), Bank Pembangunan Daerah, dll.

4) Kerjasama dengan PT. TASPEN dalam melaksanakan pembayaran uang pensiun kepada pensiunan.
5) Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) sebagai tempat pembayaran tagihan listrik.
6) Kerjasama dengan PT. TELKOM dengan menyediakan fasilitas pembayaran bagi pelanggan telepon.
7) Kerjasama dengan Departemen Agama dalam menyediakan fasilitas penyetoran uang muka Ongkos Naik Haji (ONH).

Bank BTN sementara ini memiliki jaringan kerja berjumlah 48 cabang retail. 18 cabang pembantu, 66 Kantor Kas dan 3.498 Kantor Pos. Untuk jaringan kerja di Palembang Bank BTN memiliki satu kantor cabang retail (kelas II) dan lima Kantor Kas.

c. Visi, Misi dan Nilai Dasar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

1) Visi Bank BTN

Menjadi bank yang terkemuka dan menguntungkan dalam pembiayaan perumahan dan mengutamkan kepuasan pelanggan.

2) Misi Bank BTN

Misi adalah pengungkapan atau pengutaraan visi jangka panjang dari sebuah organisasi dalam pengertian perusahaan tersebut ingin menjadi seperti apa dan siapa yang akan dilayani, adapun misi Bank BTN yaitu:

a) Memberikan pelayanan yang unggul dalam pembinaan perumahan dan industri terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.
b) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi.
c) Meningkatkan keunggulan kompetitf melalui inovasi berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
d) Melaksankan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*.
e) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

3) Nilai-nilai Dasar

Nilai-nilai dasar yang dianut oleh jajaran Bank BTN untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bank BTN adalah sebagai berikut:

a) Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, pegawai Bank BTN taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara khusuk.
b) Pegawai Bank BTN selalu berusaha untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan Bank BTN.

c) Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang baik.

d) Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN dan semua stakeholders, sebagai perwujudan dan pengabdian yang didasari oleh semangat kesediaan berkorban tanpa pamrih pribadi.

e) Pegawai Bank BTN selalu bekerjasama secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

4) Etika Perorangan

Etika perorangan pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut:

a) Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

b) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank BTN.

c) Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.

d) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi.

e) Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal yang terdapat pertentangan kepentingan.

f) Menjaga kerahasiaan nasabah dengan Bank BTN.

g) Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijaksanaan yang ditetapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

h) Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.

i) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

5) Pedoman Pegawai

Pedoman untuk semua pegawai Bank BTN sebagai berikut:

a) Kita layani secara IKHLAS, SOPAN dan SANTUN semua langganan Bank BTN dengan SENYUM, SALAM dan SAPA.

b) Dalam menunaikan tugas kita berpedoman 3 jaringan:

(1) Jangan TERLAMBAT atau MENUNDA pekerjaan.

(2) Jangan membuat KESALAHAN.

(3)Jangan MENERIMA apalagi MEMINTA atau MENGAMBIL sesuatu yang bukan haknya.

c) Kita laksankan semua tugas dengan baik secara PROFESIONAL supaya Bank Tabungan Negara MAJU, BERKEMBANG, SOLID dan SEHAT sehingga KESEJAHTERAAN pegawai dan keluarga MENINGKAT.

3. Kegiatan Perusahaan

a. Produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

1) Tabungan Batara

Manfaat sebagai berikut:

a) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di semua kantor cabang (*online*).

b) Fasilitas *auto debet* dan *auto transfer* atau transfer antar rekening .

c) Fasilitas asuransi jiwa maksimal Rp 25 juta

d) Dapat dijadikan jaminan kredit

e) Mendapatkan kartu ATM Batara

f) Bunga bersaing

g) Fasilitas rekening bersama

2) Tabungan E-Batara Pos

Manfaatnya sebagai berikut:

a) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di outlet BTN dan kantor Pos *Online.*

b) Dapat digunakan untuk berbagai transaksi

c) Bebas biaya administrasi

d) Memperoleh kartu ATM

3) Tabungan Haji Nawaitu

Mempunyai manfaat sebagai berikut:

a) Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh loket Bank BTN
b) Dapat dibuka di loket Bank BTN yang terhubung dengan siskohat Departemen Agama
c) Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan beribadah haji

4) Tabungan Batara Prima

Manfaatnya sebagai berikut:

a) Memperoleh bonus apabila tidak menarik dana selama 2 bulan
b) Memperoleh *point reward* yang dapat ditukarkan dengan hadiah langsung.
c) Memperoleh asuransi jiwa bebas premi untuk penabung perorangan.

5) Sertifikat Deposito

Manfaatnya sebagai berikut:

a) Dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan dengan cara penyerahan
b) Dapat dibuka di kantor cabang Bank BTN
c) Bunga dibayar dimuka

6) Giro

Manfaatnya adalah sebagai berikut:

a) Dapat dibuka dalam mata uang Rupiah dan Valas.
b) Mendapat jasa giro yang menarik
c) Sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya

d) Memudahkan aktivitas kebutuhan keluarga/pribadi/usaha

e) Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan

7) Deposito Berjangka

Mempunyai manfaat sebagai berikut:

a) Bunga deposito dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok.

b) Bunga deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran kredit, rekening listrik, telepon dan air.

c) Jangka waktu penempatan bervariasi mulai 1,3,6,12 hingga 24 bulan.

d) Dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valas.

e) Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit

f) Bunga menarik

b. Jasa dan Layanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

1) ATM Batara

Manfaatnya sebagai berikut:

a) Transfer antar ukuran rekening di Bank BTN

b) Penarikan uang tunai

c) Isi ualng pulsa telepon seluler

d) Untuk pembayaran angsuran KPR

e) Untuk pembayaran listrik dan telepon serta tagihan telepon seluler

f) Dapat digunakan di seluruh jaringan ATM berlogo.

2) Kiriman Uang

Kiriman uang untuk dalam negeri dengan sarana surat (*Mail Transfer*) dan *Telex* atau telepon, sedangkan luar negeri dengan sarana KU keluar meliputi *Mail Transfer*, *Telex* dan *Draft* dan KU masuk meliputi Warkat IGO BSN Malaysia, Warkat AMBB, *Mail Transfer* dan *Telex*.

3) Inkaso

Terdiri dari warkat inkaso sendiri yaitu warkat inkaso yang diterbitkan oleh kantor cabang Bank BTN yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim, dan warkat inkaso bank lain yaitu warkat inkaso yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim.

4) Money Charger

yaitu layanan jual beli mata uang asing tertentu yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

5) Inkaso Luar Negeri (*Collection*)

Terdiri dari;

a) *Outward Collection* (Inkaso Keluar)

Pengiriman warkat-warkat valuta asing dari kantor cabang Bank BTN kepada bank koresponden di luar negeri, untuk ditagihkan kepada bank penerbit.

b) *Inward Collection* (Inkaso Masuk)

Penerimaan warkat-warkat valuta asing (*Clean Collection*) dari bank koresponden Bank BTN di luar negeri untuk ditagihkan pembayarannya kepada yang tertarik di dalam negeri, umumnya berupa warkat-warkat tanpa dokumen.

6) Safe Deposit Box

yaitu sarana penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari risiko kebakaran, kejahatan, bencana alam dsb.

7) Bank Garansi

Manfaatnya sebagai berikut:

a) Melaksanakan order pekerjaan dari pemerintah atau swasta.

b) Pembelian atau penebusan barang-barang dari penjual (produsen/dealer/agen) dengan pembayaran secara angsuran atau pembayaran belakang.

c) Pembongkaran barang-barang dari kapal sebelum asli konosemen (*bill of lading*) datang.

d) Penangguhan pembayaran kewajiban tertentu kepada negara (Ditjen Bea Cukai).

8) RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

yaitu sistem transfer dana online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per-transaksi secara individual.

9) Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPH)

Memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji berkat sistem *online* dan siskohat.

10) Pembayaran KPR dan Tagihan Lainnya

Layanan untuk melakukan pembayaran tagihan KPR BTN dan tagihan rutin lainnya yang telah terdaftar (PLN, TELKOM dan pembayaran tagihan pihak ketiga yang akan dikembangkan kemudian).

11) Penerimaan Pembayaran Tagihan Telkom, PLN, HP, dan Isi Ulang HP.

12) Penerimaan Pembayaran Pajak

Penerimaan pembayaran pajak secara online dengan Ditjen Pajak melalui loket Bank BTN untuk berbagai jenis pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya.

c. Produk Kredit

1) Kredit Griya Utama

Diberikan untuk pembelian rumah, apartemen, rusun, berikut tanah dengan standar bangunan minimal sama dengan standar teknis rumah bersubsidi.

2) Kredit Griya Multi

Diberikan untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, modal kerja, sekolah atau kebutuhan konsumtif lainnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

3) Kredit Jasa Griya

Diberikan kepada pengembangan atau koperasi untuk membantu modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek perumahan.

4) Kredit Sewa Griya

Digunakan untuk keperluan membangun rumah di atas lahan milik sendiri.

5) Kredit Pemilikan Ruko

Kredit yang diberikan oleh bank untuk membeli rumah toko, guna ditempati dan digunakan sebagai toko.

6) Kredit Swadana

Diberikan kepala nasabah yang memerlukan dana segera dengan jaminan tabungan dan deposito yang di tempatkan di Bank BTN.

7) Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)

Kredit diberikan kepada perusahaan untuk penyedia fasilitas perumahan dinas perusahaan ataupun fasilitas pemilikan rumah pegawai yang didasarkan pada kerjasama antar BTN dengan perusahaan dalam mendukung program perumahan.

8) Real Cash

Penyedia jasa tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

9) Kredit Modal Kerja-*Housing Related*

Kredit modal kerja diberikan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja khususnya sektor industri yang terkait dengan perumahan, termasuk usaha-usaha penunjangnya.

10) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)

KUMK bertujuan untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman yang berasal dari Surat Utang Pemerintah (SUP) untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang relatif ringan dan terjangkau.

4. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil jawaban dari wawancara terstruktur yang telah dilakukan penulis, diantaranya sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tabulasi Jawaban per Indikator

Indikator	Responden I	Responden II	Total
Audit Internal			
1. Independensi	8	8	16
2. Kompetensi	9	8	17
3. Program Audit	7	9	16
4. Pelaksanaan Audit	9	9	18
5. Laporan yg Dihasilkan	9	9	18
6. Tindak Lanjut	9	9	18
Total	51	52	103
Good Corporate Governance			
1. Transparansi	9	9	18
2. Kemandirian	9	9	18
3. Akuntabilitas	8	9	17
4. Pertanggung Jawaban	9	9	18
5. Kewajaran	9	9	18
Total	44	45	89

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Audit Internal pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

Audit internal merupakan aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Untuk mengetahui apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan dengan semestinya dan pengendalian internal yang telah ditetapkan perusahaan, diperlukan bantuan auditor internal sebagai alat bantu bagi pencapaian tujuan perusahaan dan pengawas pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan. Auditor internal diperlukan karena semakin bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan, penyelewengan yang dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal dan belum adanya komitmen dalam penerapan *good corporate governance*. Dengan demikian manajemen akan mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Palembang dengan populasi sebanyak 2 orang, dari penelitian yang dilakukan dari wawancara maka audit internal pada Bank BTN adalah sebagai berikut:

a. Independensi

Independensi merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Tabel IV. 2
Jawaban Responden tentang Independensi

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	-	-	2	100%	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Dari tabel IV. 2 mengenai pelaksanaan independensi diperoleh bahwa jawaban responden tentang auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan auditor internal selalu berlaku objektif dalam melakukan penilaian adalah sebanyak 2 orang atau 100% dari jumlah responsen, yang menyatakan tidak objektif tidak ada. Sedangkan responden yang menyatakan audit internal menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain sebanyak 2 orang atau 100% dari jumlah responden.

Pelaksanaan audit internal pada Bank BTN dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern. Dilihat dari struktur organisasi, bagian audit internal diberi keleluasaan untuk menyelesaikan tanggung jawab pelaksanaan audit sehingga dapat dihasilkan laporan yang membantu

manajemen ke arah yang lebih baik. Bank BTN sendiri memiliki aturan bahwa auditor internal dilarang untuk menjadi pengurus perusahaan dan memiliki profesi lain selain sebagai auditor internal misalnya sebagai dewan komisaris atau pemilik dari salah satu perusahaan, hal ini guna menghindari adanya rangkap jabatan yang berakibat tidak objektif atau independen dalam melaksanakan tugas sebagai auditor internal. Audit internal pada perusahaan ini merupakan bagian terpisah dari kegiatan dan pekerjaan operasional yang rutin dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, sehingga tugas-tugas yang dilakukan secara objektif dan independen.

b. Kompetensi

Tabel IV. 3
Jawaban Responden tentang Kompetensi

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	1	50%	1	50%	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Berdasarkan tabel IV. 3 mengenai auditor internal yang kompeten diperoleh jawaban responden yang menyatakan auditor merupakan orang yang berpengalaman di bidangnya sebanyak 1 orang atau 50%, yang tidak harus berpengalaman sebanyak 1 orang atau 50%. Responden yang menyatakan auditor harus memiliki pendidikan

dan pelatihan yang lebih adalah sebanyak 2 orang atau 100% dari jumlah responden. Responden yang menyatakan bahwa auditor yang ditunjuk melakukan audit harus secara kolektif memiliki keahlian profesional yang memadai atas tugas-tugas yang akan dilakukan sebanyak 2 orang atau 100%.

Seorang auditor yang bekerja pada Bank BTN dituntut mempunyai kualifikasi yang tinggi, baik kecakapan teknik maupun moralitas dan harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan. Secara nyata auditor dituntut untuk mengetahui pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi, hukum dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan aktivitas Bank BTN.

Untuk meningkatkan kualitas auditor internal, Bank BTN selalu berusaha mengikutsertakan para auditornya dalam program pengembangan dan peningkatan kualitas diantaranya dengan pelatihan-pelatihan, kursus, dan seminar yang diselenggarakan di luar perusahaan yang dilaksanakan secara selektif dan pelaksanaan pendidikan auditor diutamakan pendidikan berkelanjutan, bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Auditor Internal (YPAI).

c. Program Audit

Tabel IV. 4
Jawaban Responden tentang Program Audit

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	1	50%	1	50%	-	-	2	100%
3	1	50%	1	50%	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Berdasarkan tabel IV.4 mengenai program audit diperoleh bahwa yang menyatakan program audit yang direncanakan selalu menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat fleksibel sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan dengan adanya program audit akan menghasilkan yang terbaik bagi perusahaan serta dapat menghemat waktu sebanyak 1 orang atau 50%, tidak selalu sebanyak 1 orang atau 50%. Responden yang menyatakan program audit selalu memberikan penanggung jawab pelaksanaan audit yang jelas sebanyak 1 orang atau 50%, tidak selalu sebanyak 1 orang atau 50% dari jumlah responden.

Program pemeriksaan internal pada Bank BTN ini disebut Program Pemeriksaan Tahunan Satuan Pengawas Intern, dalam program ini, proses pemeriksaan dimulai dari perencanaan atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang memadai agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Perencanaan ini dituangkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Program kerja pada Bank BTN disebut Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), yaitu suatu program yang dibuat untuk satu tahun pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal. Program ini berisi 4 kegiatan utama yaitu, jumlah objek yang diaudit, hari pemeriksaan, jumlah personil pemeriksa, dan hari pemeriksa (hasil kali antara hari pemeriksaan dan jumlah personil).

d. Pelaksanaan Audit Internal

Tabel IV. 5
Jawaban Responden tentang Pelaksanaan Audit Internal

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Dari tabel IV. 5 mengenai pelaksanaan audit internal diperoleh bahwa dalam pelaksanaan audit internal auditor selalu melaksanakan survey secara langsung sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit, auditor selalu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak manajemen sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan dalam pelaksanaan audit, auditor selalu berpegang teguh pada program audit yang telah ditetapkan sebanyak 2 orang atau 100%, tidak ada responden yang menyatakan tidak.

Pelaksanaan audit internal pada Bank BTN dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, yang melakukan audit setidaknya satu tahun sekali audit internal yang dilaksanakan SPI membentuk tim audit yang terdiri dari beberapa orang auditor internal bidang operasional, bidang pembangunan dan bidang umum.

e. Laporan yang Dihasilkan

Tabel IV. 6
Jawaban Responden tentang Laporan yang Dihasilkan

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Dari tabel IV. 6 mengenai laporan yang dihasilkan diperoleh bahwa laporan yang disajikan oleh auditor selalu lengkap dengan menyertakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil pemeriksaan adalah sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan dalam laporan hasil audit selalu dicantumkan tentang temuan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit sebanyak 2 orang atau 100%, yang tidak mencantumkan temuan yang ditemukan tidak ada. Responden yang menyatakan bahwa laporan audit yang dihasilkan selalu mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan keberhasilan

pelaksanaan disertai tindakan koreksi adalah sebanyak 2 orang atau 100%.

Audit internal harus melaporkan pemeriksaannya sesuai dengan penugasan yang ditetapkan. Laporan hasil pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang tepat pada waktunya. Laporan hasil pemeriksaan juga harus memuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, menyajikan informasi yang layak serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah sesuai dengan norma pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan pada Bank BTN, berisi tentang:

1) Ringkasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

   Ringkasan ini bersumber dari hasil pemeriksaan, memuat uraian singkat dan jelas atas hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan, komentar pejabat yang bertanggung jawab serta rekomendasi, dan adanya tanda tangan dari kepala Satuan Pengawas Intern.

2) Pendahuluan

   Menyajikan data umum untuk memudahkan pembaca laporan, data umum tersebut meliputi:

   a) Ruang lingkup pemeriksaan, meliputi periode yang diperiksa, lokasi, pembatasan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta pengaruhnya pada temuan yang disajikan, tujuan perusahaan.

   b) Penjelasan singkat mengenai kegiatan yang diperiksa

3) Hasil pemeriksaan

Menguraikan temuan hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya. Temuan dan saran merupakan pesan pokok yang yang akan dikemukakan kepada pembaca laporan. Dalam menyajikan laporan diusahakan agar pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebabny, dan apa pegaruh dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

f. Tindak Lanjut

Tabel IV. 7
Jawaban Responden tentang Tindak Lanjut

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Berdasarkan tabel IV. 7 mengenai tindak lanjut dapat diperoleh bahwa rekomendasi yang diberikan selalu ditindak lanjuti oleh pihak manajemen sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan auditor internal harus melakukan review pasca audit atas tindakan-tindakan yang diambil oleh suatu departemen setelah selesainya audit adalah sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan sistem pengendalian intern selalu memberikan teguran apabila objek yang diperiksa tidak melaksanakan perbaikan sesuai dengan

rekomendasi audit sebanyak 2 orang atau 100%, yang tidak memberikan teguran tidak ada.

Tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan berupa pemantauan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan. Proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Bank BTN adalah sebagai berikut:

1) Satuan Pengawas Intern harus memantau tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan untuk mengetahui apakah saran-saran yang diberikan telah dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
2) Terhadap pemantauan tindak lanjut yang memerlukan pemeriksaan, maka proses pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan sebelumnya.

2 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

a. Transparansi

Tabel IV. 8
Jawaban Responden tentang Transparansi

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Dari tabel IV. 8 mengenai pelaksanaan transparansi diperoleh bahwa laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebanyak 2 orang atau 100% menyatakan ya. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan selalu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan bahwa kebijakan perusahaan selalu dijelaskan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebanyak 2 orang atau 100%, sedang yang tidak dijelaskan tidak ada.

Berdasarkan wawancara dan hasil pengolah data prinsip keterbukaan telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, Bank BTN juga selalu menyediakan laporan keuangan maupun laporan manajemen secara berkala dan mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang material, sehingga dapat diketahui bahwa Bank BTN telah melakukan keterbukaan terhadap hal-hal yang dianggap material disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi umum untuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada stakeholders.

Informasi yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan lainnya yang disajikan oleh Bank BTN berupa visi, misi, sasaran usaha, dan informasi lainnya berupa kondisi keuangan perusahaan,

susunan pengurus, pemegang saham dan kepemilikan saham oleh anggota direksi serta anggota dewan komisaris, sistem dan pelaksanaan *good corporate governance*.

b. Kemandirian

Tabel IV. 9
Jawaban Responden tentang Kemandirian

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Berdasarkan pada tabel IV.9 mengenai kemandirian (independensi) dapat diperoleh bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing karyawan bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing karyawan telah terhindar dari terjadinya dominasi yang tidak wajar dari pihak lain sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan masing-masing organ perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan serta tidak melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain adalah sebanyak 2 orang atau 100%, sedang yang menyatakan melempar tanggung jawab tidak ada.

Berdasarkan wawancara dan hasil pengolahan data, Bank BTN dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya untuk

mengelola kegiatan perusahaan bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak lain yang tidak selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa Bank BTN hanya berpengaruh pada kebijakan pemerintah atau undang-undang yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Adanya penetapan setiap fungsi dalam perusahaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini dapat terlihat dari kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

c. Akuntabilitas

Tabel IV. 10
Jawaban Responden tentang Akuntabilitas

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	1	50%	1	50%	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Dari tabel IV. 10 mengenai akuntabilitas diperoleh bahwa Bank telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing karyawan sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG sebanyak 1 orang atau 50%, yang tidak memiliki keyakinan sebanyak 1 orang atau 50% dari jumlah responden. Responden yang menyatakan perusahaan harus

memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran sebanyak 2 orang atau 100%.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam Bank BTN belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance,* hal ini dapat terlihat dari perusahaan tidak memiliki keyakinan bahwa semua karyawan memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan juga tidak memahami atau tidak komit perannya dalam pelaksanaan GCG.

d. Pertanggung Jawaban

Tabel IV. 11
Jawaban Responden tentang Pertanggung Jawaban

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Dari tabel IV. 11 mengenai pertanggung jawaban diperoleh bahwa perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian adalah sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan perusahaan pernah bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social adalah sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuat perencanaan dan pelaksanaan yang

memadai mengenai tanggung jawab sosial adalah sebanyak 2 orang atau 100%, yang menyatakan tidak atau belum membuat perencanaan yang memadai tidak ada.

Pengelolaan Bank BTN diselenggarakan berdasarkan etika bisnis yang sehat dengan harapan dapat meningkatkan citra perusahaan, baik di kalangan perbankan maupun masyarakat. Pertanggung jawaban dalam Bank BTN itu sendiri dengan menetapkan fungsi setiap pegawai sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan yang dilakukan oleh pegawai.

Fungsi audit internal dalam pertanggung jawaban adalah mengawasi bank untuk mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini adalah tetang masalah lingkungan, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan lainnya yang menyangkut kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

e. Kewajaran

Tabel IV. 12
Jawaban Responden tentang Kewajaran

No.	Jawaban							
	S		RG		TS		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	100%	-	-	-	-	2	100%
2	2	100%	-	-	-	-	2	100%
3	2	100%	-	-	-	-	2	100%

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Berdasarkan pada tabel IV. 12 mengenai kewajaran diperoleh bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan selalu

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran sebanyak 2 orang atau 100%, tidak ada yang menyatakan perusahaan tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham dan lainnya. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan selalu memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan sebanyak 2 orang atau 100%. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan selalu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan sebanyak 2 orang atau 100%, tidak ada yang menyatakan perusahaan tidak memberikan perlakuan yang setara dan wajar.

Pada pelaksanaan prinsip kewajaran, bank harus memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk memberi masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Dalam hal ini Bank BTN telah wajar bahwa setiap informasi yang material diungkapkan secara akurat dan tepat waktu kepada stakeholders. Audit internal memastikan bahwa tidak adanya perbedaan bagi stakeholders untuk menerima informasi yang akurat, relevan dan aktual.

Dalam pelaksanaan juga setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk

mengeluarkan pendapat. Bank BTN dalam pengambilan keputusan bisnis selalu berorientasi dalam meningkatkan nilai pemegang saham.

3 Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang

Peranan audit internal dalam perusahaan merupakan kesatuan yang dibentuk perusahaan untuk memeriksa, mengawasi, mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya dalam meningkatkan *good corporate governance*, audit internal berperan dalam beberapa hal diantaranya:

a. Sebagai *Compliance Audit,* audit internal memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1) Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan perudang-undangan yang berlaku.
2) Keandalan dan kebenaran informasi
3) Keamanan asset perusahaan
4) Penggunaan sumber daya perusahaan secara ekonomis dan efesien
5) Pencapaian tujuan perusahaan dan sasaran program atau operasi.

b. *Internal Business Consulting*

Sebagai *internal business consulting*, audit internal memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1) Audit internal memberikan nasihat kepada manajemen apabila dalam melaksanakan tugasnya menemui kesulitan.
2) Audit internal juga memastikan bahwa *good corporate governance* telah dilaksanakan.

Tabel IV. 13
Jawaban Responden mengenai Audit Internal

No.	Indikator	Responden	Skor/Jawaban			Total
			S	RG	TS	
1	Independensi (3 Pertanyaan)	1	6	2	-	8
		2	6	2	-	8
2	Kompetensi (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	6	2	-	8
3	Program Audit (3 Pertanyaan)	1	3	4	-	7
		2	9	-	-	9
4	Pelaksanaan Audit (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	9	-	-	9
5	Laporan yang Dihasilkan (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	9	-	-	9
6	Tindak Lanjut (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	9	-	-	9
Total			93	10	-	103

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009

Berdasarkan pada tabel IV. 13 tentang hasil penelitian melalui wawancara terstruktur yang telah dilakukan mengenai variabel audit internal, dari 2 orang responden dapat diperoleh jumlah jawaban ya

sebanyak 93 jawaban, jika dioperasikan akan diperoleh hasil sebesar 90,30%. Hasil tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah jawaban Ya (93)}}{\text{Jumlah jawaban responden (103)}} \times 100\% = 90{,}30\%$$

Hasil tersebut memenuhi kriteria antara 76 – 100%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance* pada Bank BTN.

Tabel IV. 14
Jawaban Responden mengenai *Good Corporate Governance*

No.	Indikator	Responden	Skor/Jawaban			Total
			S	RG	TS	
1	Transparansi (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	9	-	-	9
2	Kemandirian (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	9	-	-	9
3	Akuntabilitas (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	6	2	-	8
4	Pertanggung Jawaban (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	9	-	-	9
5	Kewajaran (3 Pertanyaan)	1	9	-	-	9
		2	9	-	-	9
Total			87	2	-	89

Sumber: Data yang diolah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Palembang, 2009.

Berikut adalah hasil penelitian melalui wawancara terstruktur yang telah dilakukan mengenai variabel *good corporate governance*, dari 2 orang responden dapat diperoleh jumlah jawaban ya sebanyak 87 jawaban, jika dioperasikan akan diperoleh hasil sebesar 97,75%. Hasil tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah jawaban Ya (87)}}{\text{Jumlah jawaban responden (89)}} \times 100\% = 97{,}75\%$$

Hasil tersebut memenuhi kriteria antara 76 – 100%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* pada Bank BTN sudah meningkat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan *good corporate governance* perlu adanya peran dari audit internal. Adapun masalah yang ada dalam penerapan *good corporate governance* terletak pada karyawan yang belum memahami atau tidak komit terhadap pelaksanaan *good coporate governance*. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Badriyah (2004) dan Muhammad (2007), hasil penelitian yang dilakukan oleh Badriyah dan Muhammad menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal di dalam perusahaan berperan dalam meningkatkan *good corporate governance.* Selain didukung oleh penelitian sebelumnya, audit internal berperan dalam meningkatkan *good corporate governance* pada Bank BTN juga dapat dilihat dari laba perusahaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya kinerja keuangan perusahaan meningkat dan ini merupakan salah satu tujuan diterapkannya *good corporate governance*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai pelaksanaan audit internal terhadap peningkatan *good corporate governance* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang yang dilakukan oleh auditor internal dinilai berperan, hal ini terlihat diantaranya sebagai berikut:

1. Independensi dan objektif auditor internal pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang terjaga atau telah berjalan serta tidak ada benturan kepentingan dari pihak manapun.
2. Auditor internal pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan memadai dan berpengalaman di bidang audit.
3. Setiap tahun menjalankan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan dipublikasikan kepada pihak manajemen serta para kepentingan lain melalui website.
4. Pelaksanaan audit internal sudah terarah sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan.
5. Laporan hasil audit disajikan secara wajar berdasarkan pada hasil audit dan temuan-temuan audit internal atas hasil audit yang dilakukan.

6. Adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak manajemen yang diawasi oleh auditor.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* serta peningkatan pelaksanaan audit internal. Saran tersebut adalah:

1. Peran audit internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) sudah sangat baik tetapi disarankan untuk tetap menjaga independensi dan kompetensinya mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat dan global.
2. Pelaksanaan audit internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) sudah baik tetapi disarankan untuk lebih ditingkatkan dan mengarah pada audit berdasarkan risiko.
3. Penerapan *good corporate governance* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) sudah sangat baik tetapi disarankan kepada Direksi untuk lebih mensosialisasikan pedoman *good corporate goveranance* pada karyawan sehingga karyawan memiliki arahan yang jelas mengenai *good corporate governance*.
4. Pada penerapan *good corporate governance* disarankan kepada para karyawan untuk lebih komit dalam menjalankan perannya masing-masing berdasarkan prinsip *good corporate governance*

DAFTAR PUSTAKA

Amin W. Tunggal. 2008. **Internal Auditing**. Harvarindo, Jakarta.

Arens, Alvin A, dkk. 2007, alih bahasa Ford Lumban Gaol. **Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu**, Jilid 2, Edisi 9, PT Indeks, Jakarta.

Badriyah Rifai Amirudin. 2004. **Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Tubuh Perusahaan Publik**, on line http://www.google.com, diakses 16 Oktober 2008 jam 14:40 WIB.

Boynton, C. William, dkk, alih bahasa Paul Rajoe, Gina Gania, & Ichsan Setiyobudi. 2003. ***Modern Auditing***, Jilid 1, Edisi 7. Erlangga, Jakarta.

Champion, Dean J. 1991. ***Basic Statistic for Special Research***, Edisi ke-2, Mac Milan Publishing Company, New York.

Courtemanche, Gil. 1997, alih bahasa Hiro Tugiman. **Pandangan Baru Internal Auditing**, Kanisius, Yogyakarta.

Den Muqita Muhammad. 2007. **Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api (Persero)**, on line http://www.google.com, diakses 16 Oktober 2008 jam 14:40 WIB.

Hiro Tugiman. 2003. **Standar Profesional Audit Internal**. Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

I Nyoman Tjager, dkk. 2003. ***Corporate Governance*: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia**. PT Prenhallindo, Jakarta.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. **Standar Profesi Audit Internal**. Yayasan Pendidikan Internal Audit. Jakarta.

Loina Lalolo Krina P. 2003. **Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi**, on line http: //www.google.com, diakses 17 Mei 2008 jam 13:25 WIB.

Mardiasmo. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi, Yogyakarta.

M Arief Effendi. 2006. **Perkembangan Profesi Internal Audit pada Abad 21**, on line http://www.google.com, diakses 17 April 2009 jam 12:08 WIB.

Messier, William F, dkk. 2005, alih bahasa Nuri Hinduan, **Jasa Audit dan *Assurance*: Pendekatan Sistematis**. Buku 2, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Erlangga, Jakarta.

Mulyadi. 2002. **Auditing**, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodelogi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi 4, BPFE, Jogyakarta.

Pandu Patriadi. 2004. **Manfaat Konsep *Good Governance* bagi Institusi Pemerintah dan BUMN,** on line http: //www.google.com., diakses 13 Mei 2008 jam 12:40 WIB.

Riduwan. 2003. **Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian**, Alfabeta, Bandung.

Siswanto Sutojo. 2008. ***Good Corporate Governance.*** PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan 7, Alfabeta, Bandung.

Wahyudin Zarkasyi. 2008. ***Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya**. Alfabeta, Bandung.

Winter, William F, dkk, alih bahasa Nuri Hinduan. 2005. ***Auditing Service & Assurance***, Buku 1, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TERSTRUKTUR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI

Dengan hormat, pertanyaan wawancara ini dibuat untuk meneliti tentang Analisis Peranan Auidit Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang.

Hasil dari wawancara ini tidak untuk dipublikasikan, oleh karena itu mohon batuan Bapak/ibu/saudara/sdri untuk menjawab dengan pendapat masing-masing.
Terima kasih

PETUNJUK PENGISIAN

- Mohon Bapak/Ibu-Saudara/i mengisi daftar pertanyaan dan silahkan pilh salah satu jawaban yang sesuai dengan jawaban
  Bapak/Ibu-Saudara/i, dengan cara memberikan tanda checklist (√) pada jawaban yang dipilih.
  Jawaban yang dipilh berupa:
  S = Ya/Selalu/Harus/Pernah
  RG = Kadang-kadang/Ragu-ragu
  TS = Tidak Selalu/Tidak Pernah/Tidak Harus
- Setelah selesai menjawab semua pertanyaan saya harap Bapak/Ibu-Saudara/i memeriksa kembali jawaban yang telah diberikan dan bila telah selesain saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis kelamin : Pria ( )/ Wanita ( )
Jabatan :

A. Daftar Kuisioner tentang Audit Internal

No	Audit Internal	Jawaban		
		S	RG	TS
	Independensi			
1	Apakah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa?			
2	Apakah auditor selalu berlaku objektif dalam melakukan penilaian?			
3	Apakah audit internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain/menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain?			
	Kompetensi			
4	Apakah auditor harus merupakan orang yang berpengalaman dibidangnya?			
5	Apakah seorang auditor harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang lebih?			
6	Apakah auditor yang ditunjuk melakukan audit harus secara kolektif memiliki keahlian profesional yang memadai atas tugas-tugas yang akan dilakukan?			
	Program Audit			
7	Apakah program audit yang direncanakan selalu menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat fleksibel?			
8	Apakah dengan adanya program audit akan menghasilkan yang terbaik bagi perusahaan serta dapat menghemat waktu?			
9	Apakah dengan program audit selalu memberikan penanggung jawab pelaksanaan audit yang jelas?			
	Pelaksanaan Audit Internal			
10	Apakah dalam pelaksanaan audit, auditor selalu melaksanakan survey secara langsung?			
11	Dalam pelaksanaan audit, apakah auditor selalu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak manajemen?			
12	Apakah dalam pelaksanaan audit, auditor selalu berpegang teguh pada program audit yang telah ditetapkan?			
	Laporan yang Dihasilkan			
13	Apakah laporan yang disajikan oleh auditor selalu lengkap dengan menyertakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil pemeriksaan?			
14	Apakah dalam laporan hasil audit selalu dicantumkan tentang temuan yang ditemukan dalam pelaksanaanaudit?			
15	Apakah dalam laporan audit yang dihasilkan selalu mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi?			
	Tindak Lanjut			
16	Apakah rekomendasi yang diberikan selalu ditindak lanjuti oleh pihak manajemen?			
17	Apakah auditor internal harus melakukan review pasca audit atas			

	tindakan-tindakan yang diambil oleh suatu departemen setelah selesainya audit?			
18	Apakah sistem pengendalian intern selalu memberikan teguran apabila objek yang diperiksa tidak melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi audit?			

B. Daftar Kuisioner tentang *Good Corporate Governance*

No.	*Good Corporate Governance*	Jawaban		
		S	RG	TS
	Transparansi			
1	Apakah laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum?			
2	Apakah perusahaan selalu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya?			
3	Apakah kebijakan perusahaan selalu dijelaskan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan?			
	Kemandirian (Independensi)			
4	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing karyawan bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun?			
5	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing karyawan telah terhindar dari terjadinya dominasi yang tidak wajar dari pihak lain?			
6	Apakah masing-masing organ perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan serta tidak melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain?			
	Akuntabilitas			
7	Apakah Bank telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing karyawan?			
8	Apakah perusahaan telah memiliki keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG?			
9	Apakah perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran?			
	Pertanggung Jawaban			
10	Apakah perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian?			
11	Apakah perusahaan pernah bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial?			
12	Apakah perusahaan telah membuat parencanaan dan			

	pelaksanaan yang memadai mengenai tanggung jawab sosial?			
Kewajaran				
13	Apakah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran?			
14	Apakah perusahaan selalu memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan?			
15	Apakah perusahaan selalu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan?			

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

045/J-10/FE-UMP/SHA/VIII/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

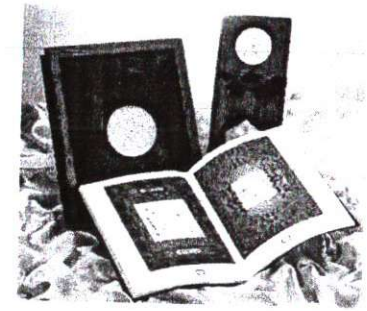

NAMA : FITRIN METASANI
NIM : 222005056
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 06 Agustus 2009

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Unggul dan Islami

Drs. Antoni

Bank BTN

NPWP : 01-001-609-5-308-001

No 122PG.1/GBA/VII/09 Palembang, 27-07-2009

Lamp : -

Kepada Yth,
Fakultas Ekonomi /Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Jl.Jend. A.Yani 13 Ulu
Di
Palembang

Perihal : Bantuan Data

Menunjuk Surat Saudara No.783/G-17/FE-UMP/VII/2009 tanggal 21-07-2009 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini kami sampaikan bahwa

N a m a : Fitrin Metha Sani
N I M : 22 2005 056
Jurusan : Akuntansi

sudah selesai memperoleh data/keterangan dari PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palembang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
KANTOR CABANG PALEMBANG

Agung Pramono Supe
Assistant Manager

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
Kantor Cabang Palembang
Jl. Jend. Sudirman No. 125 KM. 4,5
Palembang 30128
Telp. : (0711) 411175, 411282, 411554, 410433
Facs : (0711) 410854 Telex : 27422

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: FITRIN META SANI	PEMBIMBING	
NIRM/NIM	: 22 2005 056	KETUA	:Drs.SUNARDI,S.E,M.Si
JURUSAN	: AKUNTANSI	ANGGOTA	:
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PALEMBANG		

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1		Seminar UP			
2	2/6-/09	Bab I-III			Perbaiki
3	17/6-/09	Bab I.S.d III			Perbaiki
4	18/7-09	Bab I.S.d III			Acc
5	27/7.09	Bab IV.Sd			Perbaiki
6	03/8-09	Bab V			Perbaiki
7	06-8-09	Bab IV			Perbaiki
8		Bab IV			Acc
9	07-8-09	Bab V			Perbaiki
10	08-8-09	Bab V			Acc
11	11-8.09	Abstrak dll			Acc.
12					Lanjut kemp.
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal :14 / 05 /2009

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

(Drs.SUNARDI,S.E.,M.Si)

created by : Jay_PPLM'05-06

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN		IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN (S1)	:	No 3450/D/T/2005	No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
JUSURAN AKUNTANSI (S1)	:	No 3449/D/T/2005	No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)
MANAJEMEN PEMASARAN (D III)	:	No 1611/D/T/2005	No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ari / Tanggal	:	Selasa, 18 Agustus 2009
aktu	:	08.00 WIB
ama	:	**FITRIN META SANI**
M	:	22 2005 056
rusan	:	Akuntansi
ata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Sektor Publik
dul Skripsi	:	**ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PALEMBANG**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Drs. Sunardi, SE., M.Si	Pembimbing	20 - 08 - 2009	
M. Basyaruddin. R, SE. Ak. M.Si	Ketua Penguji	31 - 08 - 2009	
Drs. Sunardi, SE., M.Si	Anggota Penguji I	20 - 08 - 2009	
M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA	Anggota Penguji II	20. 08. 09	

Palembang, Agustus 2009
A.n Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI

Drs. Sunardi, SE., M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama	: Fitrin Meta Sani
NIM	: 22 2005 056
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Jenis Kelamin	: Perempuan
TTL	: Tubohan, 06 Juni 1988
Alamat	: Jl. Masa Jaya Lr. Anggrek II, Plaju Palembang
Telphone	: 0813 73609288
e-mail	: fitrinmetasani@yahoo.co.id
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Hasanul Bahri
Ibu	: Zanariah
Pekerjaan Orang Tua	:
Ayah	: PNS
Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Jl. Lintas Sumatera Ds. Tubohan, Kec. Semidang Aji, Kab. Baturaja (OKU)

Palembang,

Penulis

(FITRIN META SANI)